

PERANAN PARTAI FRETILIN DALAM KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR TAHUN 1974-1998

Oleh:

Aan Andrianto

Pembimbing:

1. Zulkarnaen, M.pd

ABSTRAK

Partai Fretilin sebelumnya dikenal sebagai Associacao Social Democratica Timorensa (ASDT) yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1974 oleh beberapa orang termasuk Jose Manuel Ramos Horta, yang kemudian menjabat Sekretaris Urusan Luar Negeri, sedangkan ketuanya, Fransisco Xavier do Amaral. Perubahan nama partai tersebut terjadi setelah kedatangan lima orang mahasiswa dari Lisbon bulan Agustus 1974. Sejak itu nama Fretilin mulai dipakai. Partai Fretilin menolak prinsip perjuangan UDT maupun Apodeti, dan tetap berpegang pada prinsipnya sendiri yakni kemerdekaan penuh bagi Timor Timur tanpa bergantung pada negara manapun.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang terdiri atas lima tahapan yaitu: penentuan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. (1) Penentuan topik merupakan tahapan awal dalam penulisan sejarah, (2) Heuristik dilakukan dengan pencarian sumber sebagai sumber sekunder maupun primer yang sesuai dengan penelitian, (3) Kritik Sumber (Verifikasi) dilakukan dengan penilaian dan pengujian terhadap sumber sejarah sehingga dapat ditentukan otentitas dan kredibilitas sumber sejarah secara akumulatif, (4) Interpretasi dilakukan dengan menafsirkan, menganalisis dan menghubungkan fakta-fakta sejarah dan (5) Historiografi sebagai tahapan akhir, dilakukan dengan menyusun secara teratur, sistematis dan kronologis fakta-fakta sejarah sehingga membentuk bangunan cerita yang dapat dimengerti oleh umum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partai Fretilin memiliki sejarah dan perjuangan yang sangat panjang untuk kemerdekaan Timor Timur. Partai Fretilin mempunyai prinsip perjuangan “kemerdekaan penuh bagi Timor Timur”. Berakhirnya rezim pemerintahan otoritarian Orde Baru yang ditandai dengan pengunduran diri mantan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai akibat dari gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa telah membuka cakrawala baru bagi penyelesaian persoalan Timor Timur. Gerakan reformasi dilakukan sebagai bentuk ungkapan kekecewaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia dan dilakukan pada saat terjadi krisis multidimensi di Indonesia. Dengan momentum reformasi itu, persoalan status Timor Timur yang menarik perhatian PBB dan masyarakat internasional diharapkan memperoleh kejelasan. Penyelesaian masalah Timor Timur ini dilanjutkan oleh B.J Habibie dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian status khusus dengan otonomi luas dalam sebuah rapat kabinet pada tanggal 9 Juni 1998.

Kata kunci: Partai Fretilin, Kemerdekaan, Timor Timur, 1974-1998.

I. Pendahuluan

Sebelumnya dikenal sebagai *Associacao Social Democratica Timorese* (ASDT) yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1974 oleh beberapa orang, termasuk Jose Manuel Ramos Horta, yang kemudian menjabat Sekretaris Urusan Luar Negeri. Sedangkan ketuanya, Fransisco Xavier do Amaral (J. Kristiadi, 1986: 930). Perubahan nama partai tersebut terjadi setelah kedatangan lima orang mahasiswa dari Lisabon bulan Agustus 1974. Sejak itu nama Fretilin mulai dipakai. Di samping programnya lebih mantap, pola gerakannya lebih bergeser ke paham Marxisme. Partai Fretilin menolak prinsip Perjuangan UDT maupun Apodeti, dan tetap berpegang pada prinsipnya sendiri yakni kemerdekaan penuh bagi Timor Timur tanpa bergantung pada suatu negara manapun.

Tiga partai politik terbesar adalah *Uniao Democratica Timorese* (UDT) yang menginginkan kemerdekaan bertahap melalui “otonomi progresif” di bawah Portugal, *Frente Revolucionaria do Timor Leste Independente* (Fretilin) yang menginginkan kemerdekaan segera, dan *Associacao Popular Democratica de Timor* (Apodeti) yang menghendaki integrasi otonom dengan Republik Indonesia. Belakangan juga muncul partai-partai politik lebih kecil, antara lain *Klibur Oan imor Assuain* (KOTA), dan *Trabalhista* (Partai Buruh).

Bulan Januari 1975, UDT dan Fretilin membentuk koalisi berdasarkan prinsip kemerdekaan, penolakan integrasi dengan Indonesia, dan pembentukan sebuah pemerintahan transisi yang terdiri dari wakil-wakil kedua partai tersebut. Namun koalisi ini gagal mengatasi berbagai perbedaan yang muncul diantara pendukung masing-masing partai dan kemudian pecah pada bulan Mei 1975. Situasi kemudian dengan cepat memburuk, hingga terjadi bentrokan terbuka antara pendukung kedua partai (Helen Mary Hill, 2000: 71).

Keberadaan Fretilin sebagai satu-satunya partai yang pro-kemerdekaan merupakan sebuah harapan dan optimisme bagi rakyat

Timor Leste. Fretilin memproklamirkan deklarasi kemerdekaan sepihak pada tanggal 28 November 1975.

Deklarasi ini tidak diakui oleh pemerintah Portugal. Dua hari kemudian, partai politik, UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalhista memproklamasikan keinginan mereka untuk mengintegrasikan Timor Timur ke dalam Indonesia, ini dikenal dengan Deklarasi Balibo. Portugal tidak mengakui kedua deklarasi tersebut karena masih menganggap dirinya sebagai penguasa administratif, dan tetap berpendapat bahwa persoalan Timor Portugis harus diselesaikan melalui sebuah referendum yang melibatkan semua partai politik.

A. Kajian Pustaka

Penulisan sejarah merupakan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah menjadi peristiwa masa lampau (Sartono Kartodirdjo, 1993: 19). Penulisan sejarah memerlukan kajian pustaka maupun kajian teori untuk memperkuat makna peristiwa-peristiwa masa lampau dan mendekati suatu peristiwa yang terjadi sebelumnya dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku sebagai kajian pustaka. Suatu sumber pustaka dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasikan, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang kita jumpai dari hasil penelitian. Penelitian mengenai “Peran Partai Fretilin dalam Kemerdekaan Timor Timur Tahun 1974-1998” menggunakan beberapa kajian pustaka sebagai berikut:

Pada rumusan masalah pertama peneliti mengkaji tentang latar berdirinya Partai Fretilin. Pada bagian ini peneliti akan mengkaji tentang sejarah lahirnya Partai Fretilin, para pemimpin Partai Fretilin, dan tema-tema nasionalisme Partai Fretilin. Peneliti menggunakan buku dari Helen Mary Hill yang berjudul Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae yang diterbitkan oleh Yayasan HAK dan Sahe Institute For Liberation di Dili pada tahun 2000. Dalam buku ini mengulas lengkap tentang gerakan nasionalis Timor Lorosae, Fretilin (Frente Revolucionario de Timor

Leste Independente/Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Lorosae) dan pendahulunya, ASDT (Associacao Social Democratica Timorese/Perhimpunan Demokrasi Sosial Timor) serta kelompok bawah tanah anti-kolonial sebelumnya yang beroperasi di bawah tanah ketika rezim fasis caetano masih berkuasa. Dengan menyoroti asal usul, gagasan-gagasan, kebijakan-kebijakan politik, serta metode-metode kerja Partai Fretilin.

Literatur kedua yang digunakan penulis untuk rumusan masalah kedua diambil dari buku karangan Zacky Anwar Makarim yang berjudul Hari-hari Terakhir Timor Timur Sebuah Kesaksian yang diterbitkan oleh Sportif Media Informasindo, Jakarta tahun 2003, menjelaskan bahwa Timor Timur merupakan daerah yang penuh konflik sepanjang waktu. Konflik panjang terjadi di sana semakin lama. Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga yang bertahan menolak bergabung. Konflik pecah dan berlangsung tiada hentinya semakin lama, sehingga tidak begitu saja bisa dihentikan. Di bawah pemerintah pemerintah Republik Indonesia, wilayah Timor Timur tidak pernah benar-benar lepas dari konflik. Semua orang berdebar menunggu perkembangan dan konflik terus semakin keras dengan perkembangan situasi nasional yang dilanda krisis multidimensional. Media massa laris dibaca, didengar dan ditonton, akhirnya muncul gagasan memeberikan otonomi khusus, yang berkembang menjadi opsi yang mengejutkan yaitu jajak pendapat untuk menentukan apakah rakyat Timor Timur ingin lepas dari Indonesia atau tetap ingin bergabung dengan wilayah Indonesia. Lahirnya opsi jajak pendapat tidaklah menghentikan konflik yang sudah akut di kawasan tersebut. Konflik bukan lagi bersifat lokal melainkan banyak dicampuri oleh pihak asing.

Literatur berikutnya yang digunakan pada rumusan masalah ketiga dari buku karangan Rien Kuntari yang berjudul Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan yang diterbitkan oleh Mizan

di Bandung pada tahun 2008. Dalam buku ini berisi tentang perjalanan Timor Timur dalam mewujudkan kemerdekaannya tahun 1998, dari perjalanan Timor Timur saat berintegrasi dengan Indonesia, kemudian keadaan darurat militer, dan hingga akhirnya Timor Timur lepas dari Indonesia.

B. Historiografi yang Relevan

Penulisan sejarah membutuhkan sumber- sumber sejarah yang relevan. Menurut Louis Gottschalk, historiografi adalah rekonstruksi rekaman dan peninggalan masa lampau secara kritis dan imajinatif berdasarkan bukti-bukti atau data-data yang diperoleh melalui proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan secara masa lampau (Louis Gottschalk, 1989: 32). Sedangkan menurut Ankersmith, historiografi adalah rekonstruksi sejarah melalui proses pengkajian dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (F.R.Ankersmith, 1985: 102).

Historiografi yang relevan digunakan untuk bahan perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai penegasan bahwa karya yang akan ditulis memang murni tulisan sendiri, bukan hasil meniru dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hal itulah yang dijadikan landasan dalam penelitian ini untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau yang tergolong baru. Adapun historiografi relevan yang penulis gunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut:

Penelitian mengenai Partai Fretilin pernah ditulis oleh Helen Mary Hill dalam bukunya yang berjudul *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*, Dili: Yayasan HAK dan Sahe Institute For Liberation, 2000. Buku ini menelusuri gerakan Timor Lorosae, Fretilin (Frente Revolucionario de Timor Leste Independente, Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Lorosae) dan pendahulunya, ASDT (Associacao Social Democratica Timorenses), Perhimpunan Demokrasi Sosial Timor) serta kelompok bawah tanah anti-kolonial sebelumnya yang beroperasi di

bawah tanah ketika rezim fasis Caetano masih berkuasa dengan menyoroti asal usul, gagasan-gagasan, kebijakan-kebijakan politik, serta metode-metode kerja Partai Fretilin (Helen Mary Hill, 2000: 214).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Helen Mary Hill terletak pada analisis yang dilakukan pada isi. Isi dalam buku Helen Mary Hill ini lebih banyak mengenai asal usul, gagasan-gagasan, kebijakan-kebijakan politik, serta metode-metode kerja Partai Fretilin. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti bermaksud mengkaji peranan Partai Fretilin dalam kemerdekaan Timor Timur.

C. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Sejarah tidak hanya mempelajari tentang peristiwa masa lampau, tetapi juga mempelajari peristiwa saat ini dan peristiwa yang akan datang sehingga, dalam penulisan sejarah juga diperlukan adanya sebuah metode. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Louis Gottschalk, 1989). Pada umumnya seseorang yang hendak melakukan penelitian sejarah pasti berusaha melepas ikatan-ikatannya dengan kepentingan kelompok, kebangsaan, ideologi dan berbagai macam hal yang dapat membuat hasil penelitiannya tidak obyektif. Meskipun demikian, seseorang tetap bisa berusaha seobyektif mungkin, hal ini karena tuntutan tradisi keilmuan. Menurut Kuntowijoyo ada lima langkah dalam penulisan sejarah yang diawali dengan pemilihan topik, pengumpulan data (heuristik), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan penulisan (historiografi) (Kuntowijoyo, 2005: 90).

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik dalam menulis karya sejarah sangat diperlukan agar penulisan memiliki batasan. Pemilihan topik sebaiknya dipilih berdasarkan dengan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual (Kuntowijoyo, 2005: 91). Kedekatan emosional yang dimaksud adalah sisi subjektif dari penulis dalam pemilihan

topik. Hal tersebut bisa berkaitan dengan hubungan emosional, kedaerahan, keturunan, dan lain sebagainya yang muncul dari objek kajian. Kedekatan intelektual adalah kemampuan dalam mengkaji objek penelitian.

b. Heuristik (Pengumpulan Data)

Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, materi sejarah atau evidensi sejarah (Helius Sjamsuddin, 2007: 89). Sumber merupakan hal yang paling penting dalam penyusunan karya sejarah. Tanpa adanya sumber peristiwa sejarah tidak akan dapat direkonstruksi menjadi sebuah kisah. penulisan ini penulis mengumpulkan sumber-sumber yang tentu saja berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Skripsi mengenai “Peranan Partai Fretilin dalam Kemerdekaan Timor Timur Tahun 1974-1998” ini merupakan penelitian pustaka.

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian historis dengan melakukan studi pustaka. Oleh karena itu penulis melakukan kegiatan pengumpulan sumber-sumber sejarah dari literatur-literatur yang bersangkutan dengan topik permasalahan. Pencarian sumber dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan-perpustakaan dan kantor arsip di daerah Yogyakarta. Penulis menemukan sumber-sumber yang berkaitan dengan penulisan tersebut, diantaranya dari Perpustakaan daerah Yogyakarta, Unit Perpustakaan Pusat UNY, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM, Perpustakaan & Laboratorium Pendidikan Sejarah UNY, Perpustakaan St. Ignatius College Yogyakarta, dan Library Center Yogyakarta. Sumber sejarah dibedakan menjadi dua yaitu: sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Menurut Louis Gottschalk sumber primer merupakan kesaksian daripada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain atau dengan alat mekanis seperti

diktafon, yaitu orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakan yang selanjutnya disebut dengan saksi mata (Louis Gottschalk, 1989: 35). Sumber primer yang dipakai dalam skripsi ini adalah :

Zakcky Anwar Makarim (2003). *Hari-hari Terakhir Timor Timur Sebuah Kesaksian*. Jakarta: Sportif Media Informasindo.

Rien Kuntari. (2008). *Timor Timur Satu Menit Terakhir : Catatan Seorang Wartawan*. Bandung: Mizan.

F.X Lopez da Cruz. (1999). *Kesaksian Aku dan Timor Timur*. Jakarta: Yayasan Harapan Timor Lorosae.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari orang kedua yang memperoleh berita dari sumber primer . Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

Gregor Neonbasu. (1997). *Peta Politik Dan Dinamika Pembangunan Timor Timur : Kajian Peta Timor Timur Sejak Proses Dekolonisasi Hingga Dua Dasawarsa Integrasi Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Jawaban Penyelesaian Masalah Timor Timur*. Jakarta: Yahnense Mitra Sejati.

Hendro Subroto. (1996). *Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar.

Andrey Sutjatmoko. (2005). *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*. Jakarta: Grasindo.

Martinho G. da Silva Gusmao. (2003). *Timor Lorosae Perjalanan Menuju Dekolonisasi Hati Diri*. Malang: Dioma.

Monica Schlicher. (2006). *Timor Timur Menghadapi Masa Lalunya. Kerja Komisi Penerimaan. Kebenaran dan Rekonsiliasi*. Aachen: Missio.

c. Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik sumber adalah usaha dan upaya menyelidiki apakah jejak-jejak yang ditemukan, setelah heuristik ‘benar’ adanya, sah,

betul-betul dapat dijadikan penulisan (I.G Widja, 1989: 18). Kritik sumber terbagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern (otensitas) bertujuan untuk mengetahui tingkat keaslian sumber, sedangkan kritik intern (kredibilitas) bertujuan untuk mengetahui kebenaran isi data tersebut dan sumber data yang digunakan (Kuntowijoyo, 1995: 101). Dari kritik sumber yang dilakukan, baik ekstern maupun intern akan didapatkan fakta sejarah. Cara penulis melakukan kritik ekstern adalah memeriksa apakah buku atau laporan yang digunakan dalam penulisan ini merupakan terbitan asli atau hanya foto kopi dari buku aslinya. Selain itu juga perlu dilihat jelas kertas yang digunakan dalam terbitan tersebut. Hal ini mengingat kertas yang digunakan pada saat ini dengan kertas masa dulu berbeda. Kemudian, cara penulis melakukan kritik intern dengan membaca tulisan dari sumber yang ditemukan dengan cara analisa wacana. Penulis akan mendapatkan fakta-fakta sejarah setelah penulis melakukan kritik sumber.

d. Interpretasi (Analisis Sumber)

Interpretasi adalah menetapkan makna yang berhubungan dengan fakta-fakta yang diperoleh melakukan kritik intern (Sidi Gazalba, 1981: 115). Interpretasi sejarah seringkali disebut juga dengan analisis. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintetis yang berarti menyatukan (Dudung Abdurrahman, 1999: 64). Dalam penafsiran, fakta-fakta tersebut dilihat hubungannya, keterkaitannya, disesuaikan dengan fokus, hal terkait dengan kegunaannya sehingga betul-betul layak dijadikan bahan dasar penulisan sejarah. Hal ini terjadi karena seorang sejarawan bebas menafsirkan fakta-fakta yang telah diperolehnya, sehingga perbedaan penafsiran antara sejarawan yang satu dengan yang lain sering terjadi. Penulis melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian sehingga nantinya akan

diperoleh gambaran yang lebih terurai dari Peranan Partai Fretilin dalam Kemerdekaan Timor Timur Tahun 1974-1998.

e. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah itu hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian, sejak dari awal sampai penarikan kesimpulan (Dudung Abdurrahman, 1999: 67). Penulisan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Karya skripsi ini menyajikan peristiwa sebab akibat sesuai dengan judul “Peranan Partai Fretilin dalam Kemerdekaan Timor Timur Tahun 1974-1998” dalam lima bab yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan suatu karya sejarah tentunya juga diperlukan suatu pendekatan-pendekatan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, karena pada hakekatnya sebuah ilmu tidak dapat berdiri sendiri dan berkaitan dengan ilmu lain. Suatu peristiwa tidak terjadi hanya karena satu sebab saja, melainkan ada sebab lain yang mempengaruhinya. Peristiwa sejarah yang terjadi disebabkan faktor-faktor yang cukup kompleks. Kompleksitas peristiwa sejarah akan dapat diuraikan tidak hanya sebagai kesatuan ekonomi, politik, sosial, religi, dan sebagainya, akan tetapi interaksinya dan mana yang domainnya (Sartono Kartodirdjo, 1982: 17).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensional, yakni pendekatan politik, pendekatan militer, pendekatan ekonomi, dan pendekatan sosial. Pendekatan politik merupakan pendekatan yang menyoroti segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud mempengaruhi dengan jalan mengubah atau

mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat (Delia Noer, 1995: 5). Menurut Sartono Kartodirdjo, pendekatan politik adalah pendekatan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan lain sebagainya (Sartono Kartodirdjo, 1992: 4). Pendekatan politik ini digunakan untuk melihat perkembangan politik Partai Fretilin dalam kemerdekaan Timor Timur.

Pendekatan militer merupakan kebijakan pemerintah mengenai persiapan dan pelaksanaan perang yang menentukan baik buruknya serta besar kecilnya potensi dan kekuatan negara, dengan demikian aktivitas militer mengikuti aktivitas politik suatu Negara (Sayidiman Suryohadiprojo, 1981: 61). Pendekatan ini untuk melihat tentang peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Timor Timur yang dianggap sering melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Timur.

Pendekatan ekonomi merupakan penjabaran dari konsep-konsep ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi dan konsumsi yang berhubungan dengan sistem sosial dan stratifikasinya dapat mengungkapkan peristiwa atau fakta dalam kehidupan ekonomi, sehingga dapat dipastikan kaidah ataupun hukumnya (Sidi Gazalba, 1981: 33). Menurut Sartono Kartodirdjo pendekatan ekonomi merujuk pada pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan lain sebagainya yang berharga dan dapat diartikan sebagai tata kehidupan perekonomian negara, sedangkan Timor Timur sekarang mempunyai eksplorasi minyak yang diyakini akan menghasilkan penemuan penting (Ign. Sandyawan Sumardi, 1996:16) .

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti segi-segi sosial yang berkaitan dengan peristiwa yang dikaji, misalnya golongan-golongan konflik berdasarkan kepentingan-kepentingan ideologis dan lainnya. Pendekatan sosiologis ini untuk melihat peranan masyarakat yang beranekaragam

dan muncul gerakan-gerakan sosial dari masyarakat yang menginginkan Timor Timur menjadi negara yang merdeka.

II. Latar Belakang Berdirinya Partai Fretilin

A. Lahirnya Partai Pfretilin

1. Gagasan Politik Dekolonisasi Portugal

Kudeta 25 April 1974 di Portugal melahirkan dua program politik baru, yaitu politik demokratisasi dan politik dekolonisasi. Gagasan demokratisasi lahir sebagai reaksi terhadap sifat-sifat rezim lama yang otoriter dan fasistis, sedangkan gagasan dekolonisasi lahir sebagai pantulan kenyataan dari munculnya perang kolonial di afrika (J. Kristiadi, 1986: 928). Gagasan dekolonisasi, baik yang tumbuh dikalangan perwira-perwira muda maupun yang tumbuh di pikiran Jenderal Spínola lahir karena latar belakang yang sama. Perang di Afrika (daerah jajahan Portugal) menyebabkan negara Portugal tertinggal dan terbelakang di antara negara-negara Eropa. Dari gagasan dekolonisasi, kemudian terciptalah politik dekolonisasi (Soekanto, 1976: 70).

Politik dekolonisasi mempunyai dua versi, yang pertama versi Spínola yang sifatnya konservatif dan kedua, versi Movimento, gerakan yang bersifat radikal dan konsekuen (Soekanto, 1976: 71). Keduanya mempunyai latar belakang dan motif yang sama, yaitu usaha untuk menyelamatkan bangsa dan negara Portugal itu sendiri, yang terlalu berat menanggung beban perang kolonialnya di Afrika sehingga negeri itu menjadi melarat dan terbelakang. Politik dekolonisasi Portugal itu bukan dilandasi oleh tuntutan zaman dan kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak bagi semua bangsa, yang mengharuskan semua penjajahan di muka bumi ini dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, melainkan karena kepentingan nasionalnya terancam.

2. Revolusi Bunga di Portugal

Revolusi Portugal yang dikenal pula sebagai “Revolusi Bunga” yang dicetuskan tanggal 25 April 1974 oleh gerakan angkatan bersenjata MFA, pada hakekatnya mempunyai sifat dasar, menumbangkan sistem pemerintahan diktaktor Salazar Caetano dan mendirikan suatu pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian tujuan pokok dari revolusi itu adalah memberikan hak/kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat Portugal, setelah 50 tahun sebelumnya hidup dalam keadaan terkekang semasa kekuasaannya diktaktor Salazar Caetano. Gerakan angkatan bersenjata (Movimento Forcas Armadas), merupakan suatu organisasi politik dan militer, dan anggota-anggotanya terdiri dari wakil ketiga angkatan. Sebagian besar anggotanya itu adalah perwira-perwira remaja berpangkat Mayor dan Kapten. Jadi MFA ini adalah semacam dewan perwakilan dari kelompok-kelompok militer yang terdapat dalam tubuh angkatan bersenjata. Di dalam organisasi tersebut, terdapat wakil-wakil dari kelompok sersan, letnan, kapten, dan seterusnya, disamping wakil-wakil dari kelompok bintara zeni, perwira kavaleri, artileri, dan lain sebagainya. Masing-masing kelompok itulah yang memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam MFA tadi (Sinar Harapan, 15 November 1975).

Cita-cita revolusi pada tanggal 25 April, sebagaimana dikemukakan dalam tulisan terdahulu adalah untuk memberikan kebebasan kepada rakyat dari cengkaman diktaktor. Perpecahan dalam tubuh angkatan bersenjata yang menjadi pioner dan sekaligus diharapkan jadi penggalang yang dominan bagi mewujudkan cita-cita itu, merupakan faktor utama yang membuat keadaan dalam negeri Portugal hancur berantakan seperti keadaan sekarang ini. Perpecahan yang mulanya dilatarbelakangi oleh alasan-alasan ideologis itu, kemudian menimbulkan hancurnya disiplin militer. Karena revolusi selalu mendambakan kebebasan,

maka bintara-bintara pun merasa bebas untuk tidak lagi mau mematuhi perintah dari atasan. Seorang kaptenpun tidak lagi merasa terikat untuk melaksanakan perintah dari seorang kolonel, bahkan sebaliknya ia berani menantang dan tidak menghiraukan perintah-perintah atasannya itu. Ada kelompok-kelompok bintara/perwira yang tidak menyetujui keputusan pemerintah untuk menggantikan komandannya, sebaliknya mereka tetap mempertahankan komandan lama. Ironisnya, pemerintah pun tidak mampu melaksanakan keputusannya, bahkan kemudian menarik kembali keputusan tersebut.

3. Lahirnya Partai Fretilin: April-November 1974

Fretilin adalah singkatan dari “Frente Revolucionario de Leste Timor” (Front Radikal Timor Merdeka), sebelumnya dikenal sebagai *Associação Social Democrática Timorense* (ASDT) yang didirikan oleh beberapa orang, termasuk Jose Manuel Ramos Horta, yang kemudian menjabat sebagai sekretaris urusan luar negeri, sedangkan ketuanya, Francisco Xavier do Amaral (Soekanto, 1976: 88). Perubahan nama partai tersebut terjadi setelah kedatangan lima orang mahasiswa dari Lisbon bulan Agustus 1974. Sejak itulah nama Fretilin mulai dipakai. Partai *União Democrática de Timor* (UDT) ini orientasi politiknya adalah tetap di bawah Portugal dengan status federasi dan merdeka setelah masa peralihan selama 20 tahun an menolak integrasi negara asing. Kebanyakan para pengikut partai ini adalah para birokrat dan kepala-kepala suku. Partai ini diketuai oleh Francisco Lopez da Cruz. Orientasi Partai *Associação Popular Democrática de Timor* (Apodeti) ini menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia menurut hukum internasional, dengan otonomi di semua segi kecuali politik luar negeri dan hankam. Pengikut partai ini dari kalangan menengah Timor Timur, yang jumlahnya paling

sedikit dari dua partai lainnya. Apodeti diketuai oleh Jose Fernando Osario.

B. Para Pemimpin Partai Fretilin

Para pemimpin Fretilin ini disoroti karena tiga kriteria. Pertama adalah arti pentingnya bagi perkembangan Fretilin. Kriteria kedua adalah mewakili kelompok yang lebih luas para pendiri dan anggota-anggota awal Fretilin, yang dengan demikian selain Xavier do Amaral, latar belakang dan karir kelompok ini adalah mewakili kelompok yang lebih luas yang aktif dalam pendirian Fretilin. Sedangkan kriteria ketiga adalah ketersediaan informasi dari pemimpin-pemimpin Fretilin tersebut.

III. Peranan Partai Fretilin dalam Mewujudkan Kemerdekaan Timor Timur

A. Strategi Menghadapi Perubahan

1. Kedatangan Pemerintahan MFA di Timor Timur November 1974

Pada tanggal 25 April 1974, gerakan angkatan bersenjata Portugis berhasil menggulingkan pemerintahan Caetano. Setelah bertahun-tahun hidup dalam pemerintahan yang mewarisi gaya kuno feodal dan masih menguasai daerah sisa kekuasaan kolonialnya, beberapa pejabat militer mengubah pemerintahan fasis itu menjadi satu yang bersepakat untuk melakukan modernisasi kapitalis dan dekolonisasi. pemimpin pemerintahan Junta Penyelamatan Nasional (Junta de Salvacao Nacional) yang baru, Antonio de Spínola memandang perlunya otonomi bagi koloni-koloni dalam kerangka kekuasaan Portugis. Tapi kebanyakan pejabat militer lainnya, setelah mengalami peperangan melawan gerakan kemerdekaan Afrika, sudah melihat perlunya memberikan suatu bentuk kemerdekaan (John G. Taylor, 1998: 45).

Setelah menggulingkan pemerintahan Caetano pada 25 April, kemudian juga memecat gubernur-gubernur di koloni-koloni

Afrika dan menggantikan mereka dengan orang-orang dari Movimento das Forças Armadas (MFA, Gerakan Angkatan Bersenjata) yang menjadi motor penggerak kup Lisboa. Tetapi di Timor, Gubernur Fernando Alves Aldeia tetap menduduki jabatannya beberapa bulan setelah April 1974, yang menjadi bulan-bulan ketidakpastian mengenai keinginan Portugal tentang masa depan Timor. Masa ini berakhir pada tanggal 18 November 1974 dengan kedatangan gubernur baru, Kolonel Mario Lemos Pires dan stafnya yang diuluki MFA (Helen Mary Hill, 2000: 117). Kedatangan gubernur baru dan pembentukan pemerintahan MFA ini bertepatan dengan pengumuman program Partai Fretilin. Pada saat pembentukan pemerintahan baru, Partai Fretilin telah memaparkan garis besar kebijakannya dan para anggota bertekad menggalang sebanyak mungkin orang Timor Timur untuk mendukung programnya, yang bertujuan pokok untuk merdeka.

2. Partai Fretilin dan UDT Membentuk Koalisi

Sebagian pemimpin UDT berharap dengan terbentuknya koalisi ini akan membantu menaikkan citra nasionalis UDT dan membantu menghentikan arus anggota yang keluar dari partai ini. Sejumlah pemimpin UDT yang nasionalis yang sejalan dengan para pemimpin Partai Fretilin dengan program politik bersama dan berusaha mengalahkan mereka dalam mengecam Apodeti dan menolak Integrasi. Pada satu saat mereka bahkan mengalahkan Fretilin dalam mengutuk neo-kolonialisme.

Koalisi antara Partai Fretilin dan UDT tidak berlangsung lama, UDT menyatakan keluar dari koalisi karena disebabkan adanya isu pengkomunisan yang akan dilakukan oleh Partai Fretilin. Isu ini bermula saat Ketua UDT Francisco Lopez da Cruz dan Wakil Ketua UDT Costa Mausinho berkunjung ke Jakarta. Semua pejabat Indonesia yang bertemu dengan mereka, termasuk letnan Jenderal Ali Murtopo dan Jenderal Surono menegaskan

kekhawatiran Indonesia terhadap bahaya komunisme, dan menyarankan kepada UDT untuk membentuk front bersama Apodeti untuk menentang komunisme.

B. Upaya Indonesia untuk Memecahkan Masalah Dekolonisasi Timor Timur

Presiden Suharto menegaskan bahwa aspirasi-aspirasi kekuatan rakyat Timor Portugis yang menginginkan berintegrasi dengan Indonesia perlu mendapat perlindungan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Indonesia dan Portugal dalam proses dekolonisasi Timor Portugis. hal ini dikemukakan Menteri Penerangan Mashuri selaku juru bicara sidang dewan stabilisasi politik dan keamanan nasional yang berlangsung di Bina Graha. Perlindungan yang dimaksud oleh mashuri adalah dengan meningkatkan kemampuan serta ketrampilan mereka untuk membela diri, termasuk memberi mereka ketrampilan dalam persenjataan.

Menteri Pendidikan Mashuri mengatakan; Simpati-simpati dan aspirasi untuk bergabung dengan Indonesia tidak boleh dianggap sepi, harus kita tanggapi, dengan sendirinya kita tidak boleh tinggal diam kalau terpaksa kita harus melindungi mereka (Sinar Harapan, 12 Desember 1975). Tapi sampai kini tidak ada pasukan Indonesia memasuki Timor Portugis untuk maksud itu, hanya mengembangkan anggota-anggota pasukan mereka untuk bergabung dengan pasukan-pasukan lain menghadapi Fretilin. Kita tidak akan masuk kesana. Sampai sekarang kita memberikan *encouragement* (dorongan) kepada rakyat yang ingin berintegrasi dengan Indonesia. Timor Portugis tidak lagi dimasukkan dalam wilayah kekuasaan pemerintah Portugal dalam naskah undang-undang dasar UUD yang kini sedang dalam proses penyelesaian. Dikatakan, dalam naskah konstitusi yang sudah disepakati itu, wilayah Portugal nanti hanya terdiri dari daerah yang kini terdapat pada kontinen Eropa ditambah pulau-pulau Azores dan Madera di lautan Atlantik. Mengenai Macau, naskah UUD tersebut

hanya menyebutkan sebagai “bukan wilayah Portugal , tetapi berada di bawah administrasi pemerintahan Portugal”, dan akan diatur dalam statuta khusus (Sinar Harapan, 15 November 1975).

C. Deklarasi Kemerdekaan Sepihak Partai Fretilin

1. Konferensi Tingkat Tinggi di MACAU, 26-28 Juni 1975

Pada akhir bulan Mei pemerintah Portugis di Lisboa mengumumkan akan diselenggarakannya *cimeira* (konferensi tingkat tinggi) di Macau pada pertengahan juni, yang akan dihadiri oleh wakil-wakil pemerintahan MFA di Timor, dengan mengundang wakil-wakil tiga perkumpulan politik (UDT, Apodeti, dan Fretilin) di Timor. Sedangkan yang memimpin konferensi adalah wakil-wakil dewan revolusi Portugis di Lisboa. Pembicaraan-pembicaraan yang diselenggarakan oleh pemerintahan MFA di Dili dengan perkumpulan-perkumpulan politik Timor pada 7 Mei, yang diboikot oleh Apodeti dan yang membuat untuk pertama kalinya Portugal mengakui hak kemerdekaan bagi Timor Timur, oleh Lisboa dianggap terlalu terburu-buru. Meskipun Lisboa berjalan dengan kecepatan penuh dalam menjalankan kesepakatan-kesepakatan di semua tanah jajahan lainnya, karena alasan tertentu, mungkin tekanan dari Jakarta, pada bulan Mei 1975 mereka memperlambat proses dekolonisasi Timor Timur (Helen Mary Hill, 2000: 163).

2. 10 Agustus: UDT Berusaha Melancarkan Kudeta dan Memulai Perang Saudara

Segera setelah mendengar terjadinya upaya kudeta yang dilakukan UDT, Gubernur Lemos Pires memanggil sidang komisi dekolonisasi MFA. Portugis menyepakati tiga prinsip: menghindari banjir darah, membuat UDT dan Fretilin untuk berunding, dan bahwa mereka tidak bisa mendukung posisi UDT untuk menyingkirkan pemimpin-pemimpin Fretilin. Menggunakan Fernando do Carmo sebagai perantara, Portugis menghubungi para

pemimpin Fretilin di gunung-gunung untuk menyampaikan 15 syarat yang harus dipenuhi sebelum mereka mau berunding dengan UDT dan Portugis. Yang terpenting dari syarat-syarat ini adalah: UDT harus segera melucuti senjatanya, mundur dari kedudukannya dan menghentikan demonstrasi-demonstrasi yang provokatif.

ketidakamanan dan pembunuhan, tentara-tentara Timor dari garnisun Dili mengambil-alih kembali atas kota, komunikasi dengan dunia luar dibuka kembali dengan akses semua pihak, pasukan para komando Portugis hanya digunakan untuk perlindungan Gubernur dan pejabat-pejabat Portugis di Dili, orang-orang yang ditahan UDT segera dibebaskan, para perunding Fretilin agar dijamin keamanannya termasuk pengawalan oleh seorang tentara timor, dan perundingan dilakukan hanya melalui Gubernur sebagai wakil Portugal. Syarat selanjutnya adalah Fretilin harus bisa memastikan bahwa semua tuntutan telah dipenuhi sebelum wakil-wakil mereka duduk bersama Portugis (Jolliffe Jill, 1978: 122).

3. Kemerdekaan Sepihak Partai Fretilin

Proklamasi kemerdekaan sepihak yang dicetuskan oleh Partai Fretilin pada tanggal 28 November 1975 di lapangan *Dos Boa Ventura* Dili yang menyatakan berdirinya apa yang menamakan dirinya sebagai negara Republik Demokrasi Timor Timur. Dalam proklamasi ini dilakukan penurunan bendera Portugal dan pengibaran bendera Fretilin. Fransisco Xavier do Amaral, ketua partai Fretilin menjadi Presiden. Berdasarkan konstituante yang dibuat, presiden berkewajiban menunjuk seorang perdana menteri. Personal kabinet disusun oleh perdana menteri, kemudian diusulkan pengangkatannya kepada presiden. Dua orang mantan mahasiswa komunis berhaluan Moist yang datang dari Portugal dalam kabinet itu adalah, Abillio Araujo sebagai Menteri

Perekonomian & Sosial dan Antonio Duarte Carvarino sebagai Menteri Peradilan Sosial (Hendro Subroto, 1996: 115).

4. Reaksi atas Deklarasi Kemerdekaan Sepihak Partai Fretilin

Pemerintah Indonesia menyesalkan tindakan Partai Fretilin yang mengproklamkan kemerdekaan Timor Portugis secara sepihak pada hari jumat, 28 November 1975. Dinyatakan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk pertentangan dengan usaha yang secara terus menerus dilakukan oleh pemerintah Indonesia ke arah tercapainya tindakan penentuan nasib sendiri oleh rakyat Timor Portugis seperti yang telah disepakati oleh ketiga partai Timor Portugis, pemerintah Portugal, dan juga oleh pemerintah Indonesia sendiri. Pernyataan pers pemerintah Indonesia mengenai apa yang disebut pernyataan sepihak kemerdekaan Timor Portugis oleh Fretilin di bacakan sabtu siang oleh Mashuri SH di istana merdeka selesai mengadakan pertemuan dengan Presiden Suharto. Pernyataan selengkapnya adalah sebagai berikut;

Pemerintah RI sangat menyesalkan tindakan sepihak oleh partai Fretilin seperti telah diberitakan oleh siaran radio dan pers luar negeri berupa apa yang disebut pernyataan kemerdekaan Timor Portugis pada tanggal 28 November 1975. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan usaha terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kearah tercapainya tindakan penentuan nasib sendiri oleh rakyat Timor Portugis melalui perundingan seperti telah disepakati ketiga partai Timor Portugis, pemerintah Portugal dan pemerintah Indonesia sendiri. Dinyatakan kembali secara resmi dalam memorandum of “understanding” sebagai hasil perundingan antara kedua pemerintah itu dan juga telah disetujui oleh ketiga partai tersebut. Sebagai diketahui oleh pemerintah Australia telah menyatakan persetujuannya atas terselenggaranya perundingan antara pemerintah Portugal dan ketiga partai tersebut,

dan malah menawarkan tempat perundingan di Australia (Sinar Harapan, 1 Desember 1975).

IV. Penyelesaian Masalah Timor Timur

A. Mengapa “Separatisme” Timor Timur?

Pada mulanya, perlawanan rakyat Timor Timur sebenarnya adalah suatu kasus perlawanan terhadap pencaplokan paksa. Ketika pemerintah Timor Timur merdeka yang dinyatakan secara sepihak sedang berusaha memantapkan kekuasaan, mengikuti pengunduran diri kekuasaan kolonial Portugis yang kacau balau, pasukan payung Indonesia diterjunkan di Dili. Timor Timur menjadi korban pencaplokan pertama di Asia Tenggara oleh negara tetangganya. Dalam bulan dan tahun berikutnya, puluhan ribu orang terbunuh dalam pertempuran, atau secara acak dibantai dalam jumlah besar sebagai suatu bentuk dari terorisme negara (Gary Van Hinklen, 1996: 1). Lebih banyak lagi yang terbunuh dalam desa-desa strategis seperti konflik di Vietnam, ketika bahaya kelaparan, sebagai akibat diisolasinya rakyat dari ladang-ladang subur, yang digambarkan oleh Palang Merah Internasional sebagai lebih buruk yang sedang melanda seluruh negeri itu.

B. Proses Penyelesaian Masalah Timor Timur

1. Tawaran (Opsi) Penyelesaian Persoalan Timor Timur

Konsep Otonomi Luas telah lama menjadi pembicaraan banyak kalangan bagi penyelesaian persoalan Timor Timur. Setelah insiden Santa Cruz, Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo sudah berusaha menyerukan otonomi bagi Timor Timur sebagai alternatif terbaik yang dapat dilakukan (Gary Van Klinken, 1996: 23). Seruan tersebut disampaikan setelah surat usulan tentang referendum yang pernah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB-Javier Perez de Cuellar mendapat reaksi keras dari Pemerintah Republik Indonesia. Dalam surat tersebut, Uskup Belo mengungkapkan pengalamannya selama bertugas untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan yang

mengalami ancaman sehingga ia meminta bantuan pengamanan dari internasional. Hal itu dilakukannya dengan alasan di Timor Timur sudah tidak ada tempat untuk melakukan pengaduan karena ABRI yang dianggap sebagai pelindung telah melakukan hal sebaliknya berupa tindakan ancaman dan kekerasan. Akan tetapi semua usulan mengenai pemberian otonomi luas di Timor Timur tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah Republik Indonesia pada saat itu karena posisi dan sikap pemerintah sangat jelas yang menganggap bahwa integrasi Timor Timur merupakan hal yang telah final dan tidak bisa ditawar (Zacky A. Makarim, 2003: 33).

2. Jajak Pendapat

Berdasarkan kesepakatan itu rakyat Timor Timur akan diminta menjawab satu dari dua pertanyaan yakni, “apakah anda menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam negara kesatuan Republik Indonesia?” atau “apakah anda menolak usulan otonomi khusus bagi Timor Timur, yang menyebabkan pemisahan Timor Timur dari Indonesia (Kompas, 7 Mei 1999). Adapun persetujuan RI-Portugal sebagai berikut;

Pasal 1, kedua pemerintah sepakat meminta Sekjen PBB untuk mengajukan rancangan otonomi khusus Timor Timur untuk memperoleh pertimbangan dari penerimaan atau penolakan mereka melalui suatu konsultasi berdasarkan penentuan pendapat yang langsung, umum, dan rahasia.

Pasal 2, meminta Sekjen PBB untuk menempatkan segera setelah penandatanganan persetujuan ini, misi PBB yang layak di Timor Timur agar dapat melaksanakan penentuan pendapat tersebut secara efektif.

Pasal 3, pemerintah Indonesia akan bertanggung jawab menjaga perdamaian dari keamanan di Timor Timur agar penentuan pendapat dapat dilaksanakan secara adil dan damai dalam suasana yang bebas dari intimidasi, kekerasan, dan campur tangan dari pihak manapun.

Pasal 4, meminta Sekjen PBB untuk menyampaikan hasil penentuan pendapat tersebut kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum, serta memberitahukannya kepada pemerintah Indonesia, Portugal, dan Timor Timur.

Pasal 5, jika Sekjen PBB menentukan bahwa berdasarkan hasil penentuan pendapat itu, rakyat Timor Timur menerima paket otonomi, maka pemerintah Indonesia harus melaksanakan otonomi luas itu dan Portugal harus menempuh Prosedur di PBB agar mengeluarkan Timor Timur dari daftar majelis umum mengenai wilayah-wilayah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri, dan menghapus masalah Timor Timur dari agenda Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

Pasal 6, jika Sekjen PBB menentukan bahwa paket otonomi tidak diterima rakyat Timor Timur, maka pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah konstitusional untuk memutuskan hubungannya dengan Timor Timur, wilayah itu akan dikembalikan statusnya seperti sebelum 17 Juli 1976 dari Pemerintah Indonesia, Portugal bersama Sekjen PBB akan menyetujui pengaturan untuk suatu pemindahan kekuasaan di Timor Timur kepada PBB secara tertib dan damai. Sekjen PBB setelah mendapat mandat tersebut akan menempuh prosedur yang memungkinkan Timor Timur memulai suatu proses transisi menuju kemerdekaan.

Pasal 7, selama masa transisi antara selesainya penentuan pendapat dari dimulainya pelaksanaan opsi yang mana pun dari hasil penentuan pendapat. Kedua pihak meminta Sekjen PBB untuk memelihara keamanan dengan kehadiran PBB yang memadai di Timor Timur (Kompas, 7 Mei 1999).

3. Reaksi Atas Situasi Keamanan di Timor Timur

Australia mendesak pemerintah Indonesia agar melepaskan pemimpin Timor Timur Xanana Gusmao sebelum dilakukannya jajak pendapat tentang otonomi Timor Timur 8 Agustus 1999. Pembebasan Gusmao menurut mereka bisa membawa stabilitas wilayah di Timor Timur yang penuh dengan pertumpahan darah. Menlu Australia, Alexander Downer mengatakan, penandatanganan tentang persetujuan paket otonomi Timor Timur yang disponsori PBB di New York antara Indonesia dan Portugal merupakan satu langkah monumental untuk merintis terwujudnya perdamaian di kawasan bekas jajahan Portugal ini (Kompas, 7 Mei 1999).

Timor Timur makin menjadi perhatian dunia setelah kesepakatan akan masa depan wilayah itu ditandatangani Indonesia

dan Portugal. Dewan Keamanan PBB mensahkan kesepakatan soal Timor Timur, yang memberikan kesempatan rakyat Timor Timur menentukan masa depannya. Tanggal 8 Agustus nanti, rakyat Timor Timur diminta menjawab pertanyaan perihal apakah akan menerima atau menolak tawaran otonomi luas dari Indonesia. Indonesia menjadikan wilayah Timor Timur menjadi provinsi ke 27 setelah ditinggalkan Portugal sesudah terjadi pergolakan. Resolusi itu sekali lagi menyatakan keprihatinan akan situasi keamanan di Timor Timur. Kelompok pro-integrasi dilaporkan mulai aktif sejak Presiden RI, BJ Habibie, Januari lalu menyatakan akan melepaskan Timor Timur jika rakyat setempat menolak otonomi luas (kompas, 8 Mei 1999).

V. Kesimpulan

Antara April 1974 dan Desember 1975 rakyat Timor Timur mengalami perubahan sosial dan politik yang sangat besar dan pergolakan militer yang sangat penting. Dalam periode ini Partai Fretilin tumbuh menjadi kekuatan utama di wilayah ini. Kelangsungan hidup Fretilin sebagai kekuatan militer dan Politik yang mampu mencegah Indonesia untuk menguasai seluruh wilayah ini jelas mencerminkan sejumlah aspek kekuatan gerakan ini dan popularitasnya yang mampu berkembang sebelum Desember 1975. Tidak lama setelah kup Lisbon April 1974 ASDT muncul sebagai kelompok yang sebagaian dibangun oleh kelompok diskusi anti kolonial yang sebelumnya bergerak dibawah tanah.

Meskipun ASDT juga menghimpun orang-orang yang bukan kelompok bawah tanah ini, kenyataan bahwa organisasi ini berideologi anti kolonialisme. Banyak sebab keberhasilan Fretilin dibandingkan UDT itu terletak pada kemampuannya untuk pada tahap yang paling awal menjadikan dirinya alat sejati nasionalisme Timor Timur. Berbeda dengan UDT yang ketika itu mengubah tujuannya menjadi kemerdekaan, kehilangan kesempatan untuk menampilkan dirinya sebagai gerakan nasionalis utama Timor Timur.

Seperti yang saya bahas dalam BAB 2, pimpinan ASDT/Fretilin terdiri atas orang-orang dari berbagai daerah yang berusia sebaya, dengan persamaan latar belakang dan pengalaman. Banyak dari mereka yang sudah saling mengenal satu sama lain ketika sama-sama duduk di bangku sekolah dan telah lama mempunyai pandangan yang sama mengenai kekuasaan Portugis. Sebagian kuliah di Portugal dan pengalaman mereka di Lisboa beberapa bulan setelah kup MFA telah menyumbang pada nasionalisme mereka dan keinginan mereka untuk pulang ke Timor Timur serta terlibat dalam berbagai macam kerja revolusioner.

Partai Fretilin adalah satu-satunya partai orang Timor yang menarik banyak mahasiswa yang belajar di Lisboa. Kebersatuan para pemimpin Fretilin pada tahun-tahun awal membuahkan besarnya kekuatan gerakan ini, khususnya karena terjadi berbagai upaya oleh UDT untuk menyingkirkan anggota yang dari radikal dari kepemimpinannya. Selama bulan-bulan awal tahun 1975, Fretilin adalah partai yang mampu meraih keuntungan dari ketidakpastian Portugis mengenai bagaimana menciptakan lembaga-lembaga perwakilan.

Seringnya melakukan kunjungan dan membentuk komite-komite daerah, para pemimpin Fretilin melangkah lebih jauh daripada partai-partai lainnya. Dimulai pada awal 1975 ketakutan akan serbuan invasi Indonesia membuat kerja Fretilin menjadi semakin mendesak dan juga mendorong para pemimpin untuk mengambil perspektif jangka panjang. Ketika memperkenalkan slogan “Merdeka atau Mati” pada bulan Maret 1975 mereka mempersiapkan orang berfikir bahwa untuk merdeka mereka harus bertempur. Meskipun secara tidak terbuka menuduh Indonesia berencana melakukan invasi.

Program pemberantasan buta huruf Fretilin dan pengembangan menjadi “brigade revolusioner” menjalankan berbagai tujuan. Awalnya pemberantasan buta huruf dan pelajaran-pelajaran pengelolaan

pertanian menarik penduduk desa pada Fretilin. Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan ini kemudian punya kandungan politisasi atau penyadaran, akhirnya dengan pembentukan “brigade revolusioner”, Fretilin bisa membangun struktur organisasi yang sementara didasarkan pada partisipasi dalam proyek-proyek perbaikan desa, juga bisa digunakan sebagai organisasi pertahanan pada saat invasi. Kepentingan saat itu yang dilakukan oleh partai Fretilin adalah kemandirian dalam penyediaan bahan makanan, memberi rakyat pendidikan medis, dan dengan demikian menegakkan gerakan pada kedudukan yang kuat kalau invasi terjadi.

Pemerintahan Fretilin selama tiga bulan setelah perang sipil tahun 1975 jelas menumbuhkan kepercayaan mayoritas rakyat Timor Timur kepada pimpinan Fretilin sebagai kelompok orang Timor yang mampu menjalankan pemerintahan negeri. Ini penting artinya untuk memperoleh kesetiaan orang-orang yang sebelumnya mendukung UDT ketika UDT mendukung kemerdekaan, dalam masa setelah para pemimpin UDT melarikan diri memasuki Indonesia dan UDT mengubah kebijakannya. Keberhasilan militer Falintil menghadapi tentara Indonesia pada minggu-minggu pertama operasi rahasia didekat perbatasan juga meyakinkan para bekas pendukung UDT bahwa partai Fretilin adalah satu-satunya partai yang mampu melawan Indonesia.

Sikap pemimpin UDT yang kebingungan apakah akan tetap bersama Portugal, mendukung kemerdekaan atau bekerja sama dengan Jakarta yang membuat mereka kehilangan dukungan. Pada tingkat internasional, Fretilin juga lebih berhasil memperoleh pengakuan sebagai partai pro-kemerdekaan yang sah di Timor Timur. Hubungan mereka dengan gerakan-gerakan pembebasan koloni –koloni Portugis di Afrika sangat membantu mereka. Terutama ketika gerakan-gerakan pembebasan ini menjadi pemerintah yang mempunyai pengaruh besar dalam Organisasi Persatuan Afrika, Majelis Umum PBB, dan Konferensi Non Blok.

Pemimpin-pemimpin UDT menggunakan pengaruhnya pada Indonesia untuk kepentingan pribadi dan tidak mampu mencegah pembubaran partai mereka, setelah invasi pemerintah Indonesia menyatakan bahwa di Timor Timur tidak ada lagi partai-partai politik. Umumnya para bekas pemimpin UDT kurang berhasil memperoleh kedudukan dalam Pemerintah Sementara Timor Timur yang disponsori Indonesia dibandingkan para pemimpin Apodeti. Hingga akhirnya Fretilin dan Apodeti bergabung demi tujuan memerdekakan Timor Timur.

Semenjak pecahnya Revolusi Bunga 25 April 1974 di Portugal dan setelah tersiar kabar tentang akan diselenggarakannya proses dekolonisasi di seluruh daerah jajahan pemerintah Portugal, saat itulah munculnya masalah di Timor Timur. Dalam perjalanan sejarah sepanjang dua dasawarsa, semenjak integrasi, proses penyelesaian masalah Timor Timur ternyata tidak semudah yang dipikirkan. Dalam arti usaha serta upaya untuk menuntaskan masalah Timor Timur tidak berjalan dengan mulus sebagaimana yang dipikirkan oleh orang-orang saat itu.

VI . Daftar Pustaka

Buku

Andrey Sutjatmoko. 2005. *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*. Jakarta: Grasindo.

Ankersmith. F. R. 1985. *Refleksi Tentang Sejarah*, Jakarta: Gramedia.

Gregor Neonbasu. 1997. *Peta Politik Dan Dinamika Pembangunan Timor Timur : Kajian Peta Timor Timur Sejak Proses Dekolonisasi Hingga Dua Dasawarsa Integrasi Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Jawaban Penyelesaian Masalah Timor Timur*. Jakarta: Yahnense Mitra Sejati.

Gery Van Klinken. 1996. *Akar Perlawanan Rakyat Timor Timur dan Prospek Perdamaianya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM.

Helius Sjamsuddin. 2007. *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta:Ombak.

- Helen Mary Hill. 2000. *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*, Dili: Yayasan HAK dan Sahe Institute For Liberation.
- Hendro Subroto. 1996. *Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar.
- Jolliffe Jill. 1978. *East Timor: nationalism & colonialism*, St.Lucia, Univ.of Queensland Press.
- Kuntowijoyo. 2005 *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta:Benteng.
- Kristiadi. J. 1986. *Dekolonisasi Timor Timur*. Jakarta: CSIS.
- Lopez da Cruz. F. X. 1999. *Kesaksian Aku dan Timor Timur*. Jakarta: Yayasan Harapan Timor Lorosae.
- Louis Gottschalk. 1958. *Understanding History; A Primer of Historical Method*, terj.Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press.
- Lela E.Madjiah. 2002. *Timor Timur Perginya Si Anak Hilang*. Jakarta: Antara Pustaka Utama.
- Rien Kuntari. 2008. *Timor Timur Satu Menit Terakhir : Catatan Seorang Wartawan*. Bandung: Mizan.
- Suhartono W.Pranoto. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*,Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sartono Kartodirdjo. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Utama
- Soekanto. *Integrasi kebulatan tekad Rakyat Timor Timur*. Jakarta: Bumi Restu, 1976.
- Zakcky Anwar Makarim. 2003. *Hari-hari Terakhir Timor Timur Sebuah Kesaksian*. Jakarta: Sportif Media Informasindo.

Koran

- Sinar Harapan, *Ketua Majelis Konstituante Portugal, Timor Tak Dimasukkan Lagi dalam Naskah UUD*. 15 November 1975.
- Sinar Harapan, *Rakyat Timor yang Ingin Bergabung: Tak Boleh Dianggap Sepi Harus Ditanggapi*. 12 Desember 1975.

Sinar Harapan, *Portugal Kecam dan Australia tidak Akui Tindakan Fretilin*. 1 Desember 1975.

Kompas, *Australia Desak Indonesia Lepaskan Xanana Gusmao*. 7 Mei 1999.

Kompas, *PBB Prihatinkan keamanan Tim Tim*. 8 Mei 1999.